



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

***Correspondence:**

Hafiez.sofyani@umy.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v4i1.16481](https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481)

Sitasi:

Sofyani, H, & Tahar, A. (2021).
Peran Akuntabilitas Dan
Transparansi Pemerintah Desa
Indonesia Terhadap Kepercayaan
Masyarakat Desa: Kasus Di
Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi
Akuntansi*, 4(1), 10-25.

Proses Artikel

Diajukan:

6 April 2021

Direviu:

10 April 2021

Direvisi:

5 Mei 2021

Diterima:

10 Mei 2021

Diterbitkan:

31 Mei 2021

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

**PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA INDONESIA TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA: KASUS DI
KABUPATEN BANTUL**

Hafiez Sofyani^{1*}, Afrizal Tahar²

ABSTRACT

This study aims to examine effect of accountability and transparency of village government on village community trust. A Mixed-methods research design with explanatory sequential model was adopted in this study. Data were collected by distributing a survey questionnaire in the first step and followed by interviews. Partial Least Square (PLS) technique was used to test the hypotheses whilst inductive thematic analysis was adopted to analyze interview data. This study discovered that the transparency enhances village community trust while accountability was in contrast. The interview results complement the result obtained from hypotheses testing using survey data. Based on the research findings, the transparency becomes a critical factor for increasing community trust in village.

KEYWORDS: *Accountability; Competence; Organizational Commitment; Transparency; Village Community Trust; Village Government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa terhadap kepercayaan masyarakat desa. Desain penelitian metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori diadopsi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner survei pada langkah pertama dan dilanjutkan dengan wawancara. Teknik Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menguji hipotesis sedangkan analisis tematik induktif digunakan untuk menganalisis data wawancara. Studi ini menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Hasil wawancara melengkapi hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data survei. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa.

KATA KUNCI: Akuntabilitas; Kompetensi; Komitmen Organisasional; Transparansi; Kepercayaan Masyarakat Desa; Pemerintah Desa.



© 2021 Hafiez Sofyani, Afrizal Tahar

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

11

Tata kelola desa di Indonesia telah berubah drastis sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dilabeli UU Desa Baru). UU desa baru telah memberikan otonomi penuh kepada desa yang menunjukkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Mengacu pada UU Desa, sebagai Daerah Otonomi Baru, desa yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima anggaran tertentu sekitar satu miliar rupiah per tahun yang ditransfer dari dana Pemerintah Pusat. Meski jumlahnya terlihat kecil jika dilihat dari standar internasional, namun nilai tersebut dinilai signifikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa. Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan, secara total alokasi dana desa meningkat setiap tahun dari Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp60 triliun (2017), Rp60 triliun (2018), dan Rp70 triliun (2019). Jumlah itu sekitar 3 hingga 3,3% dari total anggaran pendapatan negara Indonesia.

Kekhawatiran banyak pihak menjadi respon kehadiran UU desa baru ini. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini bukannya membawa manfaat bagi pembangunan desa, melainkan justru menjadi ladang baru korupsi dan inefisiensi keuangan negara di tingkat desa. Kondisi ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai pemerintahan desa yang merugikan Indonesia sekitar 40,6 Miliar Rupiah dalam kurun tahun 2014 hingga 2018 (www.nasional.kompas.com, 2018). Indonesi Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada tahun 2019 anggaran desa menjadi sektor dengan korupsi tertinggi dengan 46 kasus dan kerugian negara sekitar Rp 32,3 miliar (setara sekitar USD 2.227.586). Kasus-kasus tersebut menjadi argumen kuat orang yang tidak mendukung UU desa baru untuk tidak mempercayai pemerintah desa dan merevisi kebijakan ini. Di sisi lain, kepercayaan dari masyarakat desa diperlukan untuk pembangunan desa karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan desa ([Tsang et al., 2009](#); [Sofyani et al., 2018b](#)). Oleh karena itu, praktik tata kelola yang baik harus diterapkan di tingkat desa ([Bastian et al., 2014](#)). Hal ini karena praktik tata kelola sangat penting untuk menjamin dana desa yang kini cukup besar dapat dikelola dengan baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan desa pada khususnya dan negara pada umumnya ([Akbar et al., 2012](#), [Nguyen dan Van Dijk, 2012](#), [Tambulasi, 2009](#)).

Merujuk pada permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian terkait praktik tata kelola yang baik (good governance) di pemerintahan desa, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pasca era UU desa baru. Institusionalisasi praktik akuntabilitas dan transparansi sebagai dua aspek utama tata keola yang baik dalam pemerintahan desa dapat mengurangi potensi munculnya skandal korupsi atas dana pemerintah desa yang jumlahnya menjadi lebih besar dari sebelumnya ([Tschannen-Moran dan Hoy, 2001](#), [Mardiasmo, 2002](#), [Nurrizkiana et al., 2017](#)). Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa ([Nurrizkiana et al., 2017](#)). Namun hingga saat ini, kajian terkait praktik tata kelola di pemerintahan desa dan perannya terhadap kepercayaan masyarakat masih minim ditemukan, terutama setelah reformasi desa dengan disahkannya UU desa baru.

JAA

4.1 Menurut [Sofyani et al. \(2018\)](#), faktor kunci keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai kinerja yang sangat baik adalah komitmen organisasi yang kuat dan kompetensi aparatur desa yang baik (lihat juga: [Munti dan Fahlevi, 2017](#), [Mada et al., 2017](#), [Triyono et al., 2019](#)).

Komitmen kepala desa diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tata kelola desa yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dana desa kepada masyarakat serta melibatkan perangkat desa dan tokoh desa untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah evaluasi pembangunan desa. [Sofyani et al. \(2018\)](#) juga menemukan bahwa praktik ini memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan selanjutnya mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan desa. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadikan Desa Dlingo sebagai desa yang berprestasi dan menjadi tolak ukur desa-desa lain di Indonesia ([Sofyani et al., 2018](#)).

Karena kurangnya penelitian yang menyelidiki praktik tata kelola desa, masalah ini masih penting untuk diteliti. Karenanya, paper ini dimaksudkan menutup kesenjangan ini. Secara eksplisit, penelitian ini mengkaji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dan peran dua variabel dimaksud terhadap kepercayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan strategi sekuensial eksplanatori model [Creswell \(2012\)](#) dimana dilakukan survei pada tahap pertama dan dilanjutkan dengan wawancara pada tahap kedua. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para praktisi yaitu pemerintah desa dan regulator khususnya terkait peran penting tata kelola yang baik di pemerintahan desa, yakni akuntabilitas dan transparansi, terhadap kepercayaan masyarakat desa. Kajian ini juga menambah khasanah ilmu dengan memperluas diskusi terkait topik tata kelola dalam konteks sektor publik, khususnya di tingkat organisasi desa yang notabene masih sangat terbatas.

TINJAUAN LITERATUR DAB PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut [Mardiasmo \(2002\)](#), akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintahan mengacu pada pemberian informasi kepada publik mengenai kegiatan, program, dan kinerja baik keuangan maupun non keuangan. Entitas - dalam hal ini adalah pemerintah desa - akan berusaha mengurangi asimetri informasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan menyusun laporan keuangan dan kegiatan (kinerja) yang berkualitas dan berintegritas ([Connelly et al., 2011](#)). Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil yang positif kepada masyarakat melalui praktik transparansi. Akuntabilitas dan transparansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Hal ini sebagaimana temuan [Sofyani et al. \(2020\)](#) bahwa akuntabilitas yang baik memicu keterbukaan di pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi juga bertujuan untuk mengkomunikasikan ([Lander dan Auger, 2008](#)) dan mengesahkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa dan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai penyuplai dana ([Certo, 2003, Deegan, 2006](#)). Dengan demikian akuntabilitas yang baik akan ditampilkan kepada publik melalui media seperti website, pengumuman verbal desa atau papan informasi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. [Sofyani et al. \(2020\)](#) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Sedangkan [Nurrizkiana et al. \(2017\)](#) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

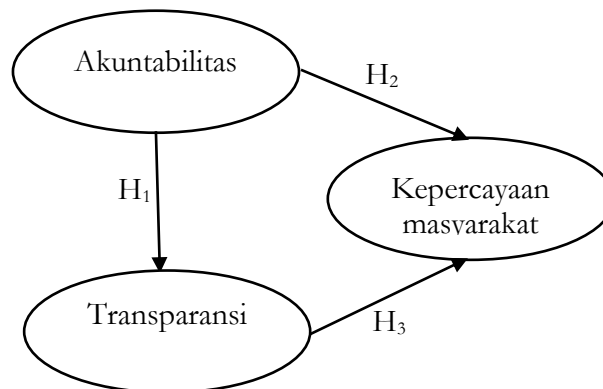
H₁: Akuntabilitas berhubungan positif dengan Transparansi.

H₂: Akuntabilitas secara positif berhubungan dengan Kepercayaan Komunitas.

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah transparansi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan tersedianya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Instruksi untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses informasi terkait kinerja instansi pemerintah tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pemerintah desa. [Nurrizkiana et al. \(2017\)](#) berpendapat bahwa apabila pemerintah dan masyarakat memiliki informasi yang berimbang (simetris) maka akan mengurangi perilaku oportunistik pemerintah dan dapat meminimalkan anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, praktik tata kelola yang baik dan nyata dalam konteks organisasi publik sangat krusial dan harus diwujudkan dalam bentuk penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas, perbaikan sistem pengendalian internal, dan pengungkapan yang lebih lengkap (transparansi) ([Halim dan Kusufi, 2012](#), [Kristiansen et al., 2009](#)). Transparansi diharapkan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah ([Grimmelikhuijsen dan Klijn, 2015](#)). [Tolbert dan Mossberger \(2006\)](#) mengungkapkan bahwa salah satu penentu kepercayaan publik adalah keterbukaan dari lembaga pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa lembaga pemerintah yang transparan cenderung rendah korupsi sehingga mereka percaya ([Kristiansen et al., 2009](#)). Persepsi ini kemudian memunculkan kesimpulan bahwa semakin transparan pemerintah maka masyarakat semakin mempercayai pemerintah ([Nurrizkiana et al., 2017](#)). Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Transparansi berhubungan positif dengan Kepercayaan Komunitas.

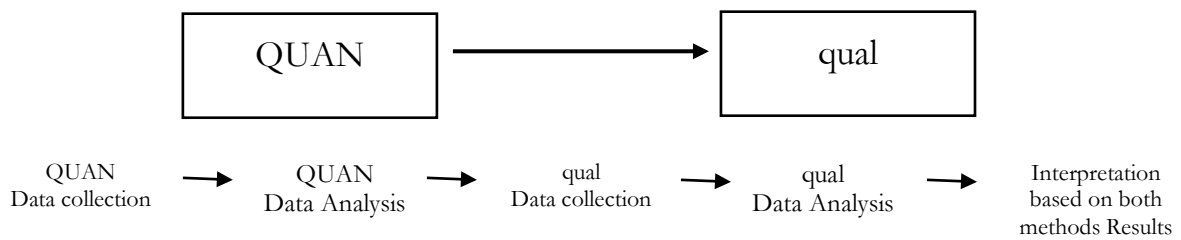
Berdasarkan hipotesis yang dikembangkan, kami merumuskan model penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Penting untuk dicatat bahwa pada Gambar 2 transparansi tidak berlaku sebagai variabel pemediasi. Hal itu karena belum ditemukan diskusi dari literature tentang peran transparansi sebagai pemediasi.



Gambar 1.
 Kerangka konseptual

Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran (*mixed-method*) dengan strategi sekuensial eksplanatori seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 ([Creswell \(2012\)](#)). Secara spesifik penelitian ini melakukan survei pada tahap pertama untuk menguji hipotesis yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dari pengujian hipotesis. Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali beberapa masalah tentang praktik akuntabilitas dan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penggunaan desain penelitian metode campuran bertujuan untuk menyeimbangkan kelemahan satu metode dengan kekuatan metode lain.

Gambar 2.
Penelitian metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori



Sumber: Creswell (2012) p. 315

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pemerintah desa yang berada di provinsi tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena sebagian besar telah melaksanakan praktek tata kelola yang baik dan menjadi desa percontohan di Indonesia. Teknik *cluster sampling* digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Penggunaan teknik *cluster sampling* untuk mendapatkan hasil yang mencakup desa-desa dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, desa yang dilibatkan dalam studi ini dipilih dengan mempertimbangkan tingkat perkembangannya dari segi prasarana dan pendapatan desa, yaitu desa dengan tingkat yang relatif maju, menengah, dan tertinggal. Responden penelitian ini dipilih sesuai dengan konsen variabel. Untuk kuesioner variabel akuntabilitas, responden yang mengisi adalah aparatur pemerintah desa. Sementara kuesioner berisi variabel transparansi dan kepercayaan masyarakat diisi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini bertujuan agar kuesioner diisi oleh pihak yang relevan dan mengurangi bias noarmatif.

Pengumpulan data berlangsung sekitar lima bulan sejak Juni hingga September 2019. Kami membagikan 300 kuesioner dan mengambilnya langsung dari responden di kantor mereka masing-masing. Tingkat pengembalian kuesioner adalah 30,66% atau 92 kuesioner dari 30 desa. Semua kuesioner yang dikembalikan diisi dengan lengkap dan dapat dianalisis. Sebenarnya kami mencoba menyebarkan kuisisioner dengan sampel desa yang lebih banyak. Namun jarak antar desa yang jauh dan jalur transportasi yang sangat sulit untuk dilalui terutama desa yang terletak di daerah terpencil, dan juga pada saat survey yang dilakukan musim hujan mulai datang membuat akses jalan semakin sulit, sehingga kami memutuskan untuk mengakhiri survey. Namun setidaknya, 30 sampel desa sudah memenuhi minimal jumlah uji korelasi pada penelitian kuantitatif (Alwi, 2015). Untuk memperkuat hasil, kami mempertimbangkan untuk melakukan beberapa wawancara.

Instrumen penelitian diadaptasi dari Sofyani (2018) untuk akuntabilitas, dan Nurrizkiana et al. (2017) untuk transparansi dan kepercayaan masyarakat. Sebelum melakukan survey lapangan, dilakukan validasi ahli dengan melibatkan lima orang dosen akuntansi yang berada pada level lector kepala dan doktor untuk mendapatkan masukan. Kami meminta mereka untuk memberikan komentar pada kuesioner dalam rangka melakukan perbaikan. Setelah beberapa saran diterima, kami memperbaiki kuesioner dalam hal penggunaan kata, struktur kalimat, jumlah pertanyaan dan panjang kalimat setiap item pernyataan. Pengukuran semua variabel menggunakan skala tipe Likert lima poin, skor 1 = "Sangat tidak setuju" hingga 5 = "Sangat setuju" digunakan untuk semua penskalaan.

Data dianalisis menggunakan dua teknik. Untuk data kuantitatif (survei) yang dimaksudkan untuk menguji beberapa hipotesis, dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) sementara dalam hal data wawancara, analisis induktif tematik yang diusulkan oleh Braun dan Clarke (2006) dilakukan. PLS adalah teknik pemodelan variabel laten yang digunakan

oleh beberapa konstruk dependen ([Fornell dan Larcker, 1981](#)) dan telah digunakan dalam banyak studi bisnis dan akuntansi ([Hall, 2008](#), [Ittner et al., 2003](#), [Sofyani, 2018](#), [Wijayanti et al., 2012](#)). Menurut [Akbar et al. \(2012\)](#), pendekatan PLS cocok untuk penelitian ini karena membuat asumsi data yang minim dan membutuhkan ukuran sampel yang relatif kecil serta landasan teoritis yang tidak kuat.

Menurut [Hair et al. \(2014\)](#), dalam menggunakan PLS, peneliti perlu mengikuti proses multi-stage yang terdiri dari (1) spesifikasi model; (2) evaluasi *outer model*; dan (3) evaluasi *inner model* dalam. Tahap spesifikasi model terkait dengan pengaturan model *inner* dan *outer*. *Outer model*, juga dikenal sebagai model pengukuran (uji validitas dan reliabilitas konstruk), digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel indikator dan konstruk yang sesuai. Sementara *inner model* atau model struktural menunjukkan hubungan antara konstruk variabel eksogen dan variabel endogen yang sedang dievaluasi.

Analisis tematik induktif yang dipromosikan oleh [Braun dan Clarke \(2006\)](#) digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola atau tema yang terkandung dalam data kualitatif berupa teks transkripsi hasil wawancara. Langkah-langkahnya meliputi pengkodean, pengelompokan ke dalam kategori, menemukan ide utama dan mengelompokkannya ke dalam tema, kemudian menemukan pola umum dari suatu kecenderungan yang ditemukan dari data ([Braun dan Clarke, 2006](#)). Untuk memastikan keabsahan data, kami memeriksa ulang hasil transkrip untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi. Sedangkan untuk memastikan reliabilitas data, kami melakukan tanya jawab dengan sesama peneliti (*peer de-briefing*) untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian ([Creswell, 2012](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei dan wawancara. Survei dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji beberapa hipotesis sedangkan tahap kualitatif dilakukan untuk mengetahui determinan dan konsekuensi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Kami juga mencoba menggali berbagai literatur dan mengaitkannya dengan fenomena yang dieksplorasi di lapangan yang diperoleh dari wawancara, kemudian mencoba menemukan benang merah dan esensi dari kedua sumber tersebut. Pada tahap kualitatif, kami melibatkan empat informan kunci yaitu aparat kecamatan (DO) yang bertugas mengawasi pemerintahan desa. Selanjutnya, kami juga melibatkan seorang asisten desa (VA) dan dua orang kepala desa (HV). Semua nama informan dirahasiakan demi keamanan seperti yang telah kita sepakati sebelum wawancara dilakukan. Informan dipilih atas dasar suka rela dan mereka telah menandatangani formulir persetujuan sebagai bukti kesediaan mereka. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan berlangsung antara 40-60 menit. Semua wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara dengan persetujuan dari semua informan.

Tabel 1 menunjukkan demografi responden dari aparat desa berdasarkan umur dan tingkat pendidikan. Terlihat bahwa mayoritas usia staf desa adalah generasi muda (46%). Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif di Indonesia karena pada masa lalu staf desa yang ditunjuk pada posisi pengurus didominasi oleh generasi tua yang usianya di atas 40 tahun. Dulu, generasi muda mencari lebih banyak pekerjaan di kota dengan menjadi PNS di kementerian, pemerintah daerah, dan beberapa perusahaan. Namun situasi saat ini menunjukkan semakin banyaknya generasi muda yang peduli terhadap pembangunan desa.

No	Karakteristik	Total	Persentase (%)
1	Usia (tahun)		
	21-30	42	46
	31-40	12	13
	>40	15	16
	Tidak mengisi	23	25
	Total	92	100
2	Tingkat pendidikan		
	SMP	9	10
	SMA	64	70
	S1	19	20
	Total	92	100
3	Jenis kelamin		
	Laki-laki	53	58
	Perempuan	39	42

Tabel 1.
Demografi
Responden

Terlihat pula bahwa jumlah pegawai pemerintah desa yang lulus dari perguruan tinggi (sarjana) adalah 20% untuk konteks responden penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa saat ini para generasi muda tertarik untuk bekerja di pemerintahan desa. Kondisi ini sangat berbeda dengan masa lalu. Perubahan regulasi tentang otonomi desa dan pemerintahan setelah UU Desa baru mensyaratkan kemampuan dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi bagi aparatur pemerintah desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah desa merekrut sarjana dan mengirimkan tenaga yang ada ke perguruan tinggi. Meningkatnya jumlah pegawai dari kalangan muda dan lulusan sarjana menunjukkan kemajuan positif dalam pembangunan pemerintahan desa di Indonesia.

Testing type	Parameter	Rule of thumb	Source
Outer Model	Convergent Validity	Outer Loading	$\geq 0,4$ (Hair et al., 2006)
		Average Variance Extracted (AVE)	$\geq 0,5$ (Fornell and Larcker, 1981)
		Communality	$\geq 0,5$ (Chin et al., 2003)
	Discriminant Validity	Cross Loading (Discriminant Validity)	Item loads on its construct \geq to other constructs (Gefen and Straub, 2005)
	Reliability	Cronbach Alpha	$\geq 0,6$ (Chin et al., 2003)
	Composite Reliability	$\geq 0,5$ (Fornell and Larcker, 1981)	
Inner Model	Structural Model	Signifikansi Path coefficient (p-value)	$< 0,05$ dan $0,001$ (Hair et al., 1995)

Tabel 2.
Kriteria
penilaian
outer model
dan inner
model pada
PLS

Pengumpulan data dari penyebaran kuesioner memakan waktu sekitar empat bulan. Jadi, untuk memastikan tidak ada jawaban yang bias, 30 tanggapan akhir (dua bulan kedua) dibandingkan dengan 62 tanggapan awal sebelumnya (dua bulan pertama) menggunakan Uji Mann-Whitney ([Field, 2009](#)). Hasil uji Mann-Whitney menyimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan antara respon awal dan akhir tidak berbeda secara statistik.

17 Kesimpulan ini didasarkan pada nilai signifikansi [Asymp. Sig. (2-tailed)] lebih besar dari 0,05.

Konstruk	Kode	Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas	AKT1	0,606	0,851	0,893	0,629
	AKT2	0,831			
	AKT3	0,907			
	AKT4	0,858			
	AKT5	0,726			
Transparansi	TRA1	0,850	0,840	0,903	0,757
	TRA2	0,911			
	TRA3	0,849			
Kepercayaan masyarakat	KM1	0,799	0,842	0,889	0,621
	KM2	0,898			
	KM3	0,826			
	KM4	0,833			
	KM5	0,534			

Tabel 3.
Hasil uji validitas dan reliabilitas konvergen

Meskipun kuesioner telah divalidasi oleh beberapa ahli, untuk mendapatkan hasil yang kuat, kami menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan PLS sebelum menguji hipotesis. Uji validitas terdiri dari dua jenis yaitu konvergen dan diskriminan. Tabel 3 menggambarkan kriteria penilaian model dalam dan luar di PLS. Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas konvergen sedangkan hasil uji validitas diskriminan ditunjukkan pada Tabel 5.

Pada uji validitas dan reliabilitas ditemukan semua pernyataan memiliki nilai *loading* lebih tinggi dari 0,4, dan nilai *composite reliability* lebih tinggi dari 0,5. Selain itu, nilai AVE dan Cronbach's alpha juga sesuai dengan *rule of thumb* yang disyaratkan yaitu lebih dari 0,7 (Hair et al., 2014, Ghozali, 2008, Hartono dan Abdillah, 2011, Ringle et al., 2015, Sholihin dan Ratmono, 2013).

Konstruk	AKT	KM	TRA
AKT	0.793*		
KM	-0.044	0.788*	
TRA	0.081	0.817	0.870*

Tabel 4.
Hasil uji validitas diskriminan

AKT = Akuntabilitas; TRA = Transparansi; KM = Kepercayaan masyarakat

Lebih lanjut, hasil *cross-loading* untuk menilai validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai korelasi pada indikator dengan item itu sendiri lebih tinggi dari pada item lainnya (lihat Tabel 4). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *outer model* atau validitas dan reliabilitas instrumen dan data telah terpenuhi, sehingga uji hipotesis dapat dilanjutkan (Ghozali, 2008, Hartono dan Abdillah, 2011, Sholihin dan Ratmono, 2013).

Hipotesis	Kode	Koefisien	P Value	Simpulan
Akuntabilitas → Transparansi	H ₁	0,104	0,398	Not Supported
Akuntabilitas → Kepercayaan masyarakat	H ₂	-0,111	0,134	Not Supported
Transparansi → Kepercayaan masyarakat	H ₃	0,826	0,000*	Supported

Tabel 5.
Ringkasan hasil pengujian hipotesis

Note: adjusted R^2 : 0,67 = substantial, 0,33 = moderate, 0,19 = weak (Chin, 1998, Henseler *et al.*, 2009)

*Significant at alpha 0,001

Tabel 5 memberikan informasi tentang Hasil Pengujian Hipotesis. Terlihat bahwa nilai R^2 yang disesuaikan untuk akuntabilitas berada pada level yang lemah, sedangkan kepercayaan masyarakat berada pada level yang substansial. Selain itu, hipotesis yang didukung hanya ada satu, yaitu H_3 .

Diskusi

Ditemukan bahwa H_1 tidak terdukung atau menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak terkait dengan transparansi. Temuan ini mungkin mengindikasikan bahwa tidak semua aspek tuntutan akuntabilitas disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Faktor kuncinya adalah kepala desa kurang memahami peraturan pertanggungjawaban (#VA, #DO). Praktis, beberapa pemerintah desa tidak menyiapkan akuntabilitas yang memadai. Di sisi lain, menurut hasil wawancara, hasil ini juga ditengarai karena masyarakat desa kurang mengetahui dengan baik bahwa mereka sebenarnya berperan untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa atau untuk meminta pertanggungjelasan (#HV2). Akibatnya, masyarakat desa tidak menuntut transparansi dari pemerintah desa (#DO, # HV2).

“... Hal ini (peran masyarakat dan perangkat desa sebagai pengawas pemerintahan desa) belum dipahami dengan baik oleh masyarakat karena UU Desa belum tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, masyarakat desa tidak memiliki harapan atau tuntutan terhadap transparansi pemerintahan desa.” (HV2)

“Sebagian besar masyarakat desa dalam satu kecamatan di sini kurang mementingkan akuntabilitas desa. Sementara itu, banyak desa yang tidak memenuhi tuntutan akuntabilitas dengan baik. Melihat masyarakat yang juga tidak menaruh perhatiannya, beberapa pemerintah desa tidak menyampaikannya (melakukan transparansi) secara penuh kepada masyarakat.” (DO)

Alasan lain yang mungkin menjelaskan mengapa akuntabilitas tidak berkaitan dengan transparansi adalah fokus pemerintahan desa yang masih dominan pada akuntabilitas internal, yakni kepada kabupaten (bupati) atau provinsi (gubernur) daripada akuntabilitas eksternal, yakni akuntabilitas pemerintah desa kepada pemangku kepentingannya seperti parlemen dan masyarakat ([Akbar et al., 2012](#)). Hal ini dikarenakan akuntabilitas internal akan berdampak langsung pada penurunan jumlah transfer dana yang akan diterima desa, sedangkan akuntabilitas yang rendah kepada masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan, bahkan tidak ada konsekuensi tertentu.

Selanjutnya, alasan lain juga muncul dari salah satu informan yang menyatakan bahwa bisa jadi rancangan pertanggungjawaban yang dibuat hanya dibuat-buat sehingga beberapa pemerintah desa tidak mempublikasikannya. Secara spesifik, untuk memenuhi pertanggungjawaban persyaratan, beberapa desa telah “menyalin-tempel” laporan pemerintah desa dari desa lain tanpa menunjukkan orientasi substantif dari tujuan akuntabilitas itu sendiri. Fenomena ini menyimpulkan bahwa dalam praktik akuntabilitas didasari fenomena isomorfisme mimetik ([DiMaggio dan Powell, 1991](#), [DiMaggio dan Powell, 2000](#)). [DiMaggio dan Powell \(1991\)](#) menjelaskan bahwa proses institusionalisasi di suatu organisasi dapat terjadi karena tiga motif yang kemudian mereka sebut isomorfisma: koersif (paksaan), mimetic (meniru), dan normatif. Kekurangan institusionalisasi dari koersif

dan mimetic adalah adanya potensi bahwa praktik yang diinstitusionalisasikan, seperti tata kelola, berjalan hanya sekedar memenuhi tuntutan regulasi, tidak berorientasi substansial (Sofyani et al., 2018a). Akhirnya, hal tersebut akan mengarah pada ketaatan semu (Gudono, 2014).

“Di desa tempat saya tinggal, tidak ada transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa, meski dilakukan akuntabilitas. Saya menduga pertanggungjawaban yang disiapkan oleh beberapa pemerintah desa sebenarnya tidak bersumber dari kegiatan nyata yang terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa desa tentu saja mempersiapkan akuntabilitas dan transparansi mereka dan juga melaksanakan praktik tata kelola mereka dengan cara sesuai peraturan berlaku.” (DO)

“Memang di lapangan ada beberapa desa yang menjalankan akuntabilitas. Namun ada beberapa desa yang hanya menyalin dan menempelkan laporan dari desa lain dalam hal akuntabilitas. Tinggal diganti nama desanya... Sehingga kondisi ini memicu transparansi yang buruk.” (VA)

Berdasarkan petikan wawancara di atas, terdapat dua variabel potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut sebagai penentu akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa yaitu pemahaman masyarakat desa tentang perannya dalam mengawasi kegiatan pemerintahan desa dan tingginya harapan masyarakat desa terhadap praktik pemerintahan. Dua variabel potensial ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam riset selanjutnya terkait determinan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Temuan lain dari wawancara menyimpulkan bahwa terdapat beberapa desa yang kepala desanya memiliki kekuasaan yang sangat kuat untuk mendominasi masyarakat dan elemen desa lainnya termasuk Dewan Permusyawaratan Desa (DPD) (#VA, #DO). Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Lestari et al. (2014) yang menyatakan bahwa kepala desa cenderung memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur semua kebijakan yang ada di desa tanpa ada pihak yang berani mengkritik. Bahkan, DPD yang seharusnya menjadi lembaga yang mengkritisi dan mengoreksi kebijakan kepala desa ternyata hanya menjadi lembaga “stempel” yang mengesahkan kebijakan apapun yang dibuat oleh kepala desa. Akhirnya, transparansi mengenai dana dan program desa tidak diberikan kepada masyarakat yang justru takut (di bawah hegemoni) kepada kepala desa yang memiliki kekuasaan kuat di desa.

“Di desa saya, kepala pemerintahan desa memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Akibatnya, semua kegiatan hanya dikelola oleh dia dan kroninya. Akibatnya, kegiatan yang harus dilakukan seperti akuntabilitas, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan desa dan kegiatan lain tidak dilakukan dengan baik dan ideal. Ketika DPD mengkritik kebijakannya, dia tidak menerima dan mengabaikan kritik tersebut.” (DO)

Kondisi ini sejalan dengan sudut pandang teori hegemoni manajerial yang menjelaskan bahwa jika pimpinan organisasi memiliki superpower maka mekanisme pengawasan dalam organisasi tidak berjalan secara substantif, bahkan lembaga pengawas hanya menjadi litigasi atas semua kegiatan yang dilakukan oleh manajemen puncak (Cohen et al., 2008). Dalam konteks yang tegas, ini ditunjukkan oleh dewan dan komite yang menyertainya berada di bawah kendali manajemen puncak dan hanya ada untuk memenuhi persyaratan peraturan (Kosnik, 1987). Kondisi ini tampaknya lebih berorientasi simbolis (memenuhi persyaratan regulasi daripada substansi). Dengan menggunakan cara pandang ini, terlihat bahwa keadaan seperti ini rupanya juga telah terjadi di beberapa pemerintahan desa saat ini. Hal

tersebut mungkin juga disebabkan oleh nuansa politik yang sangat kental dalam praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa itu sendiri.

Selanjutnya, H₂ tidak terdukung atau akuntabilitas tidak dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Seorang informan dari aparat kecamatan (#DO) berpendapat bahwa fenomena semacam ini mungkin saja disebabkan karena sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat nyata dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Meski sudah dibuat akuntabilitas, kepercayaan masyarakat masih rendah. Pada gilirannya mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa yang rendah. Temuan ini menimbulkan kecurigaan bahwa akuntabilitas tidak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat jika masyarakat tidak merasa puas dengan manfaat program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini, kepuasan masyarakat atas suatu program berperan sebagai pemediasi. Temuan ini menjadi saran untuk diujicobakan dalam penelitian selanjutnya.

“Masyarakat desa lebih cenderung mengawasi situasi apa adanya. Maksud saya, yang mereka pedulikan adalah perubahan positif apa yang mereka terima dan program-program manfaat apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ketika masyarakat tidak merasakan perubahan (kemajuan), masyarakat tidak peduli dengan akuntabilitas pemerintah desa. Akibatnya, rasa percaya mereka kepada pemerintah desa tidak meningkat” (DO)

Selain itu, dari wawancara yang dilakukan, kami juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh keadilan pemerintah desa (#DO dan #VA). Di beberapa desa, program yang dijalankan hanya menyentuh masyarakat tertentu seperti keluarga aparat desa dan pendukung kepala desa sedangkan masyarakat di lapisan bawah cenderung diabaikan. Kondisi ini memicu masyarakat menjadi apatis terhadap pemerintah desa dan selanjutnya membuat mereka menjadi pasif dan enggan mengikuti program pembangunan desa, bahkan mengabaikan akuntabilitas pemerintah desa. Oleh karena itu, variabel ini (keadilan) disarankan untuk diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

“Masyarakat juga akan percaya dan kemudian mendukung pemerintah desa jika mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan program. Namun, saat ini di beberapa desa masih terjadi diskriminasi dimana hanya sekelompok kecil tertentu yang dilibatkan dalam program desa. Banyak program pemberdayaan, misalnya, hanya dilakukan untuk keluarga aparat desa atau pendukung kepala desa pada saat pemilihan. Akhirnya masyarakat menjadi apatis dan tidak mau membantu desa.” (VA)

Terakhir, H₃ ditemukan terdukung atau kepercayaan masyarakat dideterminasi oleh praktik transparansi. Hasil ini sesuai rumusan hipotesis dan penelitian sebelumnya dari [Nurrizkiana et al \(2017\)](#). Namun hasil ini memperluas literatur hubungan praktik transparansi dan kepercayaan masyarakat mengingat studi ini dilakukan pada konteks yang berbeda, yakni pemerintahan desa. Temuan ini bisa jadi karena masyarakat desa yang kuat dalam kultur kebersamaan akan merasa dihargai keberadaannya ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dikabarkan (diinformasikan) kepada mereka. Karenanya, rasa percaya kepada pemerintah desapun akan tumbuh. Temuan ini menjadi implikasi penting bagi pemerintah desa untuk menggalang dukungan dari masyarakat dalam program pembangunan desa. Sebagaimana temuan [Sofyani et al \(2018b\)](#) bahwa praktik transparansi dan partisipasi di desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa Dlingo dan selanjutnya memicu mereka untuk berperan aktif ikut serta membangun desa.

SIMPULAN

21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat desa terkait dengan transparansi, namun tidak dengan akuntabilitas. Karena studi dan literatur tentang pemerintahan desa masih terbatas, hasil studi ini memberikan wawasan kepada khasanah pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang signifikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan temuan ini, implikasi penting yang disarankan adalah pemerintah desa perlu selalu menjaga transparansi secara optimal dengan memberikan akses dan informasi penting mengenai program dan pengelolaan dana kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat.

Selain kontribusi penting, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup pemerintahan desa di satu kabupaten di Indonesia yaitu Bantul. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak memiliki generalisasi yang kuat dalam konteks yang lebih luas. Karenanya, kami menyarankan untuk melakukan studi serupa di berbagai wilayah geografis khususnya di Indonesia untuk memperluas studi ini. Mengingat masih minimnya penelitian yang dilakukan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, baik determinan dan perannya, maka penelitian lebih lanjut penting dilakukan untuk menggali permasalahan tersebut dengan menggali variabel-variabel lain seperti dampak praktik akuntabilitas pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Menarik juga untuk mengkaji peran pembina desa terhadap pemerintahan desa karena merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun mendapat perhatian yang sangat terbatas. Variabel lain yang disarankan untuk diteliti adalah keadilan pemerintah desa, pemahaman masyarakat desa tentang peran mereka dalam mengawasi kegiatan pemerintahan desa, dan tingginya ekspektasi masyarakat desa terhadap praktik pemerintahan sebagaimana kami soroti pada bagian diskusi paper ini.

Ucapan terima kasih

Penelitian ini didukung oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam dana hibah penelitian nomor: 034 / PEN-LP3M / I / 2019-2020 skema penelitian kemitraan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para asisten peneliti yang telah membantu kami dalam proses pencarian data, mereka adalah Khaeril Wahyu, Hanif Fahrur Rozi, dan Rohmaida Lestari.

Lampiran

Kuesioner penelitian

AKUNTABILITAS

No	Pertanyaan	STS	TS	AS	S	SS
1	Banyak transaksi berkenaan dengan penggunaan uang desa tidak disertai bukti transaksi yang sah (terotorisasi).	STS	TS	AS	S	SS
2	Format pelaporan keuangan pemerintahan desa di tempat saya bekerja tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.	STS	TS	AS	S	SS
3	Laporan keuangan yang disusun pemerintahan desa di tempat saya bekerja dibuat secara lengkap.	STS	TS	AS	S	SS
4	Penyelesaian laporan keuangan pemerintahan desa di tempat saya bekerja selalu tepat waktu.	STS	TS	AS	S	SS

JAA
4.1

No	Pertanyaan	STS	TS	AS	S	SS
5	Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa di tempat saya bekerja tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan.	STS	TS	AS	S	SS

TRANSPARANSI

No	Pertanyaan	<i>Rating</i>				
<i>Pemerintah desa saya secara berkala melaporkan informasi tentang...</i>						
1	• perolehan dan penggunaan uang desa (APBDes) baik melalui media baliho kantor desa, rapat (pertemuan) desa, atau website pemerintah desa.	1	2	3	4	5
2	• kegiatan desa yang telah dilaksanakan baik melalui media baliho kantor desa, rapat (pertemuan) desa, atau website pemerintah desa.	1	2	3	4	5
3	• capaian prestasi desa yang telah diraih baik melalui media baliho kantor desa, rapat (pertemuan) desa, atau website pemerintah desa.	1	2	3	4	5

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

No	Pertanyaan	<i>Rating</i>				
1	Seberapa percaya masyarakat di desa anda bahwa pemerintah desa anda bekerja secara amanah (dapat dipercaya).	1	2	3	4	5
2	Seberapa yakin masyarakat di desa anda bahwa pemerintah desa anda bekerja untuk kepentingan rakyat .	1	2	3	4	5
3	Seberapa aktif masyarakat di desa anda berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa .	1	2	3	4	5
4	Seberapa puas masyarakat di desa anda terhadap hasil kerja pemerintah desa .	1	2	3	4	5
5	Seberapa taat masyarakat di desa anda terhadap himbuan dari pemerintah desa .	1	2	3	4	5

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262-291.
- Alwi, I. (2015). Kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 140-148.

- Bastian, I., Wardani, A. K., & Riyani, E. I. (2014). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. *Administrative science quarterly*, 533-546.
- Certo, S. T. (2003). Influencing initial public offering investors with prestige: Signaling with board structures. *Academy of Management Review*, 28(3), 432-446.
- Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling. *MIS quarterly*, 22(1).
- Cohen, J. R., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2008). Form versus substance: The implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(2), 181-198.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Deegan, C. (2006). Legitimacy theory. *Methodological issues in accounting research: theories and methods*, 161-182.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1991). *The new institutionalism in organizational analysis* (Vol. 17): University of Chicago Press Chicago, IL.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields *Economics meets sociology in strategic management* (pp. 143-166): Emerald Group Publishing Limited.
- Field, A. (2009). *Discovering Statistics Using SPSS*. 3rd edn SAGE Publications Limited: London: UK.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
- Gefen, D., & Straub, D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. *Communications of the Association for Information Systems*, 16(1), 5.
- Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Alternative Method with Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grimmelikhuisen, S., & Klijn, A. (2015). The effects of judicial transparency on public trust: evidence from a field experiment. *Public Administration*, 93(4), 995-1011.
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R., & Black, W. (1995). *Multivariate data analysis*. Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). *Multivariate data analysis* (Vol. 6): Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106-121.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Public Sector Accounting: theory, concept and application*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, M. (2008). The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. *Accounting, organizations and society*, 33(2-3), 141-163.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2011). *Concept and Application of PLS (Partial Least Square) for Empirical Research*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing *New challenges to international marketing* (pp. 277-319): Emerald Group Publishing Limited.
- Ittner, C. D., Larcker, D. F., & Meyer, M. W. (2003). Subjectivity and the weighting of performance measures: Evidence from a balanced scorecard. *The Accounting Review*, 78(3), 725-758.
- Kosnik, R. D. (1987). Greenmail: A study of board performance in corporate governance. *Administrative science quarterly*, 32(2), 163-185.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. *Contemporary Southeast Asia*, 64-87.
- Lander, G. H., & Auger, K. A. (2008). The need for transparency in financial reporting: Implications of off-balance-sheet financing and inferences for the future. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 4(1), 27-46.
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, I. M. P. (2014). Dissecting an Accountability of Financial Management Practices in Pakraman Kubutambah Village, Kubutambah District, Buleleng Regency, Bali Province. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1-12.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Mardiasmo. (2002). *Public Sector Accounting*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Journal of Accounting and Investment*, 18(2), 172-182.
- Nguyen, T. T., & Van Dijk, M. A. (2012). Corruption, growth, and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam. *Journal of Banking & Finance*, 36(11), 2935-2948.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinants of Transparency and Accountability of Regional Financial Management and Its Implications to Trust of Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH, <http://www.smartpls.com>.

- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sofyani, H. (2018). Does Performance-Based Budgeting Have a Correlation with Performance Measurement System? Evidence from Local Government in Indonesia. *Foundations of Management*, 10(1), 163-176.
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor?. *Asian Journal of Business and Accounting*, 11(1), 151-227.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690.
- Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S. A., & Widiastuti, H. (2018). Management and Governance Practices in Dlingo Village in Bantul Regency: Learning from the Pilot Village. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1-16.
- Tambulasi, R. I. (2009). All that glitters is not gold: new public management and corruption in Malawi's local governance. *Development Southern Africa*, 26(2), 173-188.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The effects of e-government on trust and confidence in government. *Public administration review*, 66(3), 354-369.
- Triyono, T., Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118-135.
- Tsang, S., Burnett, M., Hills, P., & Welford, R. (2009). Trust, public participation and environmental governance in Hong Kong. *Environmental Policy and Governance*, 19(2), 99-114.
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and teacher education*, 17(7), 783-805.
- Wijayanti, A. W., Muluk, M. R. K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(3), 10-17.